

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bagian dari sistem akuntansi yang mengumpulkan seluruh transaksi bisnis menjadi suatu ringkasan sebelum diolah dan disajikan informasinya sebagai laporan keuangan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2004). Kualitas yang dapat diandalkan mengacu pada tidak adanya kesalahan signifikan dan konten yang menipu. Untuk mencakup laporan keuangan yang signifikan & dapat dipercaya, SFAC No. 8 telah mengidentifikasi aspek kualitatif laporan keuangan. Integritas laporan keuangan ditentukan oleh bahan-bahan yang digunakan suatu perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara wajar. Ketika keluaran laporan disajikan dengan cara yang dapat dipercaya, jujur, dan bebas manipulatif, sehingga memungkinkan pengguna untuk mempercayai laporan tersebut. Atingingsih dan Suparwati, (2018).

Laporan keuangan yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan secara akurat dianggap memiliki integritas yang tinggi. Atribut kualitatif yang penting dari informasi laporan keuangan adalah keterwakilan dan relevansi yang memadai, seperti yang dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, pihak yang berkepentingan dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menemukan fitur kualitatif. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu dikembangkan untuk menggambarkan keadaan bisnis saat ini dengan tepat. Namun pada praktiknya, banyak laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan data sebenarnya dan tidak memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan. Jika laporan keuangan jujur dan tidak menipu pembacanya, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan baik. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara jujur, tidak memihak, dan wajar, sesuai dengan Pernyataan Konsep Akuntansi Keuangan (SFAC) No. 2 yang mendefinisikan integritas laporan keuangan. Relevansi dan representasi yang tepat adalah dua kualitas penting yang harus dimiliki oleh informasi dalam laporan keuangan, menurut Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB), agar dapat membantu dalam mengambil pilihan.

Perusahaan menggunakan informasi dari laporan keuangan untuk memberitahu investor, staf, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pencapaian tujuan perusahaan. Untuk menghindari menyesatkan pengguna laporan keuangan, penting bagi bisnis untuk mengungkapkan kondisi perusahaan yang benar saat membuat laporan keuangan. Pemahaman tentang integritas laporan keuangan itu sendiri diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dapat diandalkan, dan mencerminkan keadaan bisnis. Secara keseluruhan, Marlinda (2022). Menurut International Standard Board (IASB), H.Akram & Prayitno Basuki (2018), relevansi dan reputasi yang sesuai merupakan karakteristik penting yang diperlukan untuk menentukan pilihan atas laporan keuangan.

Perusahaan yang berintegritas akan tetap eksis di masa depan karena kinerjanya yang sangat baik. Pengamatan atau pengawasan internal perusahaan sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang sangat jujur dan mencegah penipuan, yang dapat terjadi dalam jenis bisnis apa pun.

Dengan ditetapkannya struktur kepemilikan dan kepengurusan dalam bisnis yang sering disebut dengan tata kelola perusahaan yang sistematis dan teratur dengan konsep GCG (*Good Corporate Governance*), maka dilakukan pemantauan atau pengawasan. GCG bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan kinerja komersial untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi investor dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang berkepentingan, sambil tetap mematuhi kewajiban hukum dan nilai-nilai moral. Kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen merupakan beberapa lembaga tata kelola perusahaan yang mendukung atau berfungsi sebagai pengendali dalam organisasi Isiantoro et al., (2018). Menurut Soedaryono dan Riduifana (2017), tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah suatu cara untuk mengelola perusahaan sedemikian rupa sehingga seluruh operasional dapat berfungsi sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) mencantumkan lima konsep yang membentuk sistem GCG: akuntabilitas, keterbukaan, independensi, akuntabilitas, dan keadilan atau kesetaraan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dapat berdampak pada keluaran laporan keuangan karena semakin mempersulit manajemen untuk

memalsukan laporan keuangan karena tata cara penyajian informasi keuangan diawasi oleh panitia verifikasi dan dewan komisaris. Perusahaan diarahkan dan dikendalikan melalui sistem GCG. Definisi ini menunjukkan bagaimana GCG dapat berfungsi untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, kolaborasi, dan tujuan bersama di antara seluruh pemangku kepentingan dalam bisnis, sehingga memungkinkan deteksi dini masalah keagenan.

Karena banyaknya bisnis yang melakukan kecurangan, hal ini mempengaruhi kepercayaan akuntan publik, khususnya auditor eksternal. Kepercayaan pemangku kepentingan terhadap keakuratan laporan keuangan dirusak oleh manipulasi laporan keuangan. Standar akuntansi harus diikuti agar laporan keuangan yang disediakan oleh suatu perusahaan atau organisasi dianggap jujur. Laporan keuangan harus akurat, jujur, dan hanya berdasarkan fakta. Keandalan, dapat dipercaya, kejujuran, dan integritas dalam pelaporan keuangan merupakan prasyarat.

Fenomena Bank Jambi seperti dilansir Detik.com pada tahun 2023 akan terlihat seperti ini. Direktur Utama Bank Jambi ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi di Bank Jambi senilai Rp. 310 miliar, menurut Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jaksa dalam persidangan dakwaan mengetahui telah terjadi manipulasi. Tujuan sidang perdana ini adalah untuk membacakan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jambi. Ketua Majelis Hakim Pemberantasan Korupsi mengawasi agenda persidangan.

Jaksa dalam dakwaannya menyatakan Bank Jambi melakukan kesalahan saat membeli surat utang jangka menengah PT SNP untuk mendongkrak pendapatan bank milik pemerintah daerah di Jambi tersebut. Kesalahan tersebut dilakukan terdakwa saat menjabat sebagai Direktur Pemasaran Bank Jambi.

Untuk PT SNP sebagai penerbit telah menggunakan laporan keuangan yang datanya diubah. Melalui agen PT MNC Sekuritas, Bank Jambi sengaja membeli surat utang jangka menengah yang diterbitkan PT Sunprima Nusantara Pembinaan (SNP) antara tahun 2017 hingga 2018. Tanpa melakukan riset, produk surat utang jangka menengah PT SNP tersebut terbeli. Langkah pembelian ini juga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak menerapkan manajemen risiko dalam proses pembelian surat utang, seperangkat teknik dan protokol untuk menentukan, mengukur, melacak, dan mengelola risiko yang terkait dengan seluruh operasional

bank, termasuk transaksi perbankan.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), catatan keuangan dengan data palsu dimanfaatkan dalam surat penawaran tertulis dari PT MNC Sekuritas, pengelola yang menyiapkan dokumen penawaran PT SNP dalam bentuk nota informasi dan penelitian bagi calon investor. Laporan keuangan dirancang untuk memberikan kesan bahwa mereka dalam keadaan sehat dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Sebenarnya PT SNP sudah mengalami kesulitan keuangan sejak tahun 2010. “Hal ini terlihat dari arus kas, uang keluar lebih besar dibandingkan uang masuk,” kata Albert. Jaksa dengan tegas menyatakan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 18 Undang-Undang yang sama, yang mengatur dan memidana tindak pidana, adalah bagian dari undang-undang yang sama.

Kejadian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang merupakan kumpulan tata cara, adat istiadat, pedoman, peraturan, dan pendirian yang berdampak pada pengelolaan, pengarahannya, dan pengendalian suatu perusahaan atau korporasi, merupakan sumber informasi yang baik mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Laporan keuangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh penggunaan tata kelola perusahaan yang baik. Tiga mekanisme komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional berfungsi sebagai pendukung tata kelola perusahaan yang baik dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, tiga mekanisme Okomisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional membantu tata kelola perusahaan yang baik. Kepemilikan institusional, menurut Jensen dan Meckling (1976), berperan penting dalam mengurangi ketidaksepakatan antara pemegang saham dan manajer. Ada dua kerangka kerja untuk tata kelola perusahaan yang baik, yang pertama adalah kepemilikan institusional, yang berarti bahwa suatu institusi memiliki saham suatu perusahaan. Samrotun dan Wardhani (2020). Tanggung jawab kepemilikan institusional adalah mengawasi perilaku manajer untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Oleh karena itu, manajemen diharapkan mendapat tekanan untuk tidak bertindak tidak rasional, seperti memalsukan laporan keuangan.

Sejumlah investigasi dan kajian masih dilakukan untuk mengetahui penyebab menurunnya kinerja perbankan. Ketidakstabilan perekonomian merupakan dampak dari kurang baiknya penerapan tata kelola perusahaan yang sehat sehingga berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perbankan. Menurut studi World

Bank, krisis ekonomi yang melanda negara-negara ASEAN disebabkan oleh kegagalan untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG), yang berdampak pada penurunan banking performance. Alasan utama belum diterapkannya GCG adalah lemahnya kerangka hukum, kurangnya pengawasan dewan komisaris dan auditor, serta praktik perbankan yang tidak etis sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selain itu, terdapat metode manajemen laba yang menggabungkan perilaku peluang dengan keuntungan perusahaan sehingga merendahkan integritas laporan keuangan. Untuk dunia usaha, penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting. Peran komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional membentuk kerangka tata kelola perusahaan yang kuat dan memiliki posisi terbaik untuk melakukan pekerjaan pemantauan. Apabila komisaris independen masuk ke dalam perusahaan dari luar maka mereka dianggap sebagai komisaris independen, yaitu suatu badan yang dibentuk oleh korporasi yang tugasnya mengevaluasi kinerja manajemen secara keseluruhan. Tujuan dari komisaris independen adalah untuk menjaga keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan, seperti melindungi pihak terkait dan pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan peran pengawasan yang tidak tepat oleh dewan komisaris terhadap dewan direksi dan manajemen. Jumlah komisaris independen dikaitkan dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham nonpengendali, dengan ketentuan jumlah komisaris independen mewakili paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris

Konsep yang dikenal dengan “tata kelola perusahaan yang baik” dicetuskan untuk meningkatkan kinerja usaha dengan menjamin akuntabilitas pengelolaan kepada pemangku kepentingan dan mengawasi atau memantau kinerja pengelolaan sesuai dengan kerangka hukum. Konsep tata kelola perusahaan yang kuat diperkenalkan untuk mendorong peningkatan transparansi pengelolaan bisnis bagi seluruh pengguna laporan keuangan. Jika ide ini berhasil dilaksanakan, diharapkan pengelolaan usaha akan menjadi lebih transparan dan pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga, sehingga akan memberikan manfaat bagi sejumlah pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat diterapkan di suatu perusahaan untuk memastikan bahwa sistem yang ada berfungsi dengan baik. Avivi (2017).

Fenomena lain juga terjadi di Bank Lampung menyikapi hasil BPK RI di PT. Satuan Kerja Pengelola Anggaran Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun

Anggaran 2020–2021. Hasil berbagai investigasi jelas menunjukkan bahwa Bank Lampung melakukan korupsi yang disengaja. Penyelesaian kredit bermasalah belum digunakan oleh PT. Bank Lampung telah mematuhi peraturan yang bertujuan untuk menurunkan kerugian bank. Sebagai salah satu jenis penipuan, manajemen Bank Lampung dengan sengaja menyesatkan laporan keuangan sehingga merugikan kreditur dan investor serta menyebabkan “penurunan” pendapatan yang terjadi setiap tahunnya hingga saat ini. Manipulasi ini akibat pihak-pihak yang memanfaatkan peluang untuk mengambil keuntungan dari informasi palsu. Uang yang seharusnya masuk ke kas daerah malah berakhir di keuangan pribadi pejabat yang diduga koruptor.

Contoh penerapan prinsip GCG antara lain unit kerja yang mengelola fungsi pengendalian intern bank, tugas dan tanggung jawab komite, serta tanggung jawab dewan komisaris dan direksi. Jika terdapat keterkaitan antara bagian internal dan eksternal perusahaan yang bersangkutan, maka penerapan GCG akan terlaksana. Sejumlah persyaratan integritas, kompetensi, dan stabilitas keuangan harus dipenuhi oleh anggota direksi dan dewan komisaris. Tujuan dari komisaris independen adalah untuk menjaga keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk melindungi pihak terkait dan investor minoritas. Perhatian utama Peran Komisaris Independen adalah untuk melindungi pemegang saham dari praktik penipuan. Komisaris perorangan adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan direksi, komisaris lain, pemegang saham pengendali, atau kelompok lain yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk bertindak secara mandiri atau hanya demi kepentingan perusahaan.

Kepemilikan institusional menjadi barometer praktik tata kelola perusahaan yang dapat diterima. Sebuah faktor yang menunjukkan caranya kehadiran pemegang saham mempengaruhi efektivitas manajemen sehubungan dengan pelaporan keuangan organisasi adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dinilai mampu mengurangi kecurangan manajemen dalam pengarsipan dan penyajian laporan keuangan serta menjalankan peran pengawasan yang efisien. Sinulingga, 2020.

Tugas komite audit meliputi pengawasan internal perusahaan terhadap manajemen risiko, pelaksanaan audit, proses pelaporan keuangan, dan penerapan

tata kelola perusahaan yang baik dalam bisnis. Ketika manajemen dan auditor internal dan eksternal menjalankan fungsi pengendalian, komite audit juga berfungsi sebagai penghubung antara dewan komisaris dan pemegang saham. Tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk memaksimalkan peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi dan komisaris.

Perusahaan harus menerapkan kualitas audit yang kuat di samping tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan integritas laporan keuangan. Jika suatu audit memenuhi kriteria audit yang diakui secara luas, kualitas audit dapat dicapai. Menurut Akram dkk. (2017), penggunaan laporan keuangan menunjukkan bahwa kualitas audit terjadi jika auditor dapat menjamin tidak adanya kesalahan atau kejadian (fraud) dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Leverage adalah elemen lain yang mungkin berdampak pada keakuratan laporan keuangan. Keputusan manajemen mengenai penyajian informasi yang benar dalam laporan keuangan diyakini dipengaruhi oleh penggunaan hutang yang berlebihan dibandingkan dengan aset perusahaan. Perusahaan harus sangat transparan terhadap informasi keuangannya jika ingin menghilangkan kekhawatiran kreditor terhadap kemampuan perusahaan membayar utangnya. Bisnis yang menggunakan banyak leverage menghadapi banyak risiko keuangan karena memiliki banyak hutang sehingga menghadapi tantangan keuangan untuk mendanai asetnya. Tingkat risiko Menaikkan tingkat keuangan tidak diragukan lagi akan menghambat dan memperlambat kemampuan pimpinan untuk mengakui keberhasilan perusahaan dan meningkatkan upaya tidak jujur untuk memalsukan laporan keuangan. Bisnis dengan pangsa pasar yang signifikan tidak sepenuhnya mampu menghilangkan sepenuhnya kemungkinan menipu investor melalui penggunaan data keuangan. Samrotun & Wardhani, (2020).

Rasio leverage menurut Verea (2017) digunakan untuk mengetahui seberapa besar suatu usaha dibiayai oleh hutang. Bagi dunia usaha, utang merupakan sumber pendanaan yang signifikan. Bisnis tertentu bahkan bergantung pada utang untuk berkembang. Meskipun demikian, utang yang berlebihan juga dapat menjadi pertanda buruknya kesehatan bisnis. Kemampuan suatu bisnis dalam memenuhi seluruh utangnya dengan sumber daya yang dimilikinya disebut dengan leverage (Hery, 2016). Seorang manajer keuangan menggunakan leverage sebagai alat utama untuk memperkirakan pendapatan dan memilih sumber keuangan terbaik lainnya

untuk meningkatkan modal perusahaan guna mengimbangi ekspansi. bisnis yang diantisipasi atau direncanakan di tahun-tahun mendatang. Bisnis yang menggunakan banyak leverage mempunyai risiko keuangan yang besar.

Persentase aset perusahaan yang berasal dari pembiayaan hutang disebut leverage. Karena organisasi dengan leverage yang tinggi akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya di mata pemangku kepentingan khususnya kreditor, maka leverage diduga berkontribusi terhadap tingginya integritas laporan keuangan. Sangat (2017). Pelaporan keuangan berintegritas tinggi membantu kreditor dalam memahami tujuan dan potensi bisnis serta dalam menentukan besaran pinjaman yang harus diberikan. Dunia usaha harus memberikan informasi secara akurat dan luas sesuai dengan keadaan yang ada. leverage yang besar menunjukkan bahwa perusahaan menanggung risiko keuangan yang cukup besar sehingga kesulitan membayarnya, Pradika dan Nurdiniah (2017). Perusahaan harus transparan mengenai situasi keuangan mereka dan bertindak dengan integritas untuk menghilangkan kekhawatiran kreditor mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Besarnya jumlah utang tersebut menunjukkan bahwa korporasi optimis mampu melunasinya di masa depan. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran karena ketidakmampuan perusahaan membayar utangnya dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu memanipulasi dan merugikan semua pihak.

Ada kemungkinan Penerapan pengelolaan korporasi dan investasi yang baik dapat membantu memperbaiki reputasi industri perbankan yang rusak, melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan, dan meningkatkan kepatuhan bank terhadap undang-undang, peraturan, dan prinsip etika umum yang relevan, sehingga menciptakan citra sistem perbankan yang sehat. Diharapkan bahwa integritas laporan keuangan perbankan juga akan dipengaruhi oleh penerapan sistem manajemen perusahaan yang baik di sektor perbankan.

Dengan menawarkan layanan keuangan kepada masyarakat umum, industri perbankan berupaya memaksimalkan pendapatan. Penghasilan laba merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan bank, oleh karena itu pengelolaan perbankan harus senantiasa mempertahankan laba yang diperolehnya. Kemampuan bank untuk tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya bergantung pada lingkungan

keuangannya. Perbankan harus berupaya mengelola sumber dayanya dengan baik dan efisien agar bisnis dapat mencapai tujuan perbankannya. Secara umum, bank didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kerugian yang dapat membahayakan kemampuan bisnis untuk bertahan hidup. Laporan keuangan yang dihasilkan pada akhir setiap periode memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perbankan, Rahayu, Silvia (2022).

Banyak penelitian sebelumnya telah menyelidiki hubungan antara kepemimpinan perusahaan yang baik dan kekuatan terhadap integritas laporan keuangan, tetapi hasilnya berbeda-beda, Penelitian ini dilakukan oleh, AyuNurhaliza, (2023) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut, Cahyaningtyas, (2022) komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, menurut (putra, 2022) integritas laporan keuangan tidak terpengaruh oleh kepemilikan institusional atau komisaris independent dan menurut, Laeli, (2023) komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan untuk *leverage* menurut, Ayu Nurhaliza, (2023) *leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut, Wardhani & Samrotun, (2020) *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh, Ayu Nurhaliza, (2023) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance*, dan *Levergae* terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa sebagai variabel dependennya, leverage berdampak negatif terhadap integritas laporan keuangan, dan subjek penelitian adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Sebaliknya, komite audit dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada variabel ini. Peneliti akan memodifikasi dari penelitian, Ayu Nurhaliza, (2023), dengan menambah variabel independen pada mekanisme *good corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, dan juga menambahkan *leverage*. Peneliti juga mengubah objek penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Bank Pembangunan Daerah wilayah Sumatra sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan objek pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Alasan mengapa peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini, karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan hasil antara variabel

dependen dan variabel independennya, alasan selanjutnya peneliti mengambil wilayah Sumatra karena pada fenomena yang terjadi pada Bank Jambi membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam BPD yang ada di Sumatra dan peneliti juga ingin memastikan apakah fenomena yang di alami Bank Jambi juga terjadi pada BPD di wilayah Sumatra.

Berdasarkan latar belakang diatas menyebabkan perlunya dilakukan penelusuran terhadap kebenaran laporan keuangan bank guna mengetahui apakah kejadian tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan Perusahaan Bank Jambi. Oleh karena itu, penulis memilih judul untuk diselidiki lebih lanjut.

“PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT, DAN *LEVERAGE* TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH WILAYAH SUMATRA”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian, adapun fokus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap Integritas Laporan Keuangan.
2. Mengetahui data dari pengaruh kepemilikan institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan.
3. Mengetahui data dari pengaruh komite audit terhadap Integritas Laporan Keuangan.
4. Mengetahui data dari pengaruh *leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1.4.1 Manfaat Keilmuan

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lanjutan. Khususnya, penelitian tentang dampak dari komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan leverage harus dilakukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi, hasil penelitian di harapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur bagi para peneliti selanjutnya, selain itu juga di harapkan dapat menjadi penguat untuk pembentukan sebuah teori yang berkaitan Pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan *leverage*, terhadap Integritas Laporan Keuangan.
2. Bagi perusahaan mengantisipasi bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan berharga untuk menyampaikan laporan keuangan yang jujur dan memberikan wawasan bagi para pengambil keputusan.